

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN
UNTUK MENGURANGI KEMISKINAN
DI DESA NGAMPEL KECAMATAN NGUSIKAN KABUPATEN JOMBANG**

Arifin¹, Supriyanto², Anang Rohmad Jatmiko³

aripin61@gmail.com, supriyanto@gmail.com, anangrahmad@gmail.com

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Darul ‘Ulum Jombang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pengelolaan pangan yang diterapkan oleh pemerintah desa Ngampel dalam mewujudkan ketahanan pangan di desa tersebut. Penegelolaan pangan yang bijak dapat membantu pemerintah untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi di Desa Ngampel kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositivme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Dalam penelitian ini, Informan terdiri dari tiga kelompok utama, yaitu Kepala Desa, Pendamping Pemberdayaan, dan Masyarakat. Dari Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa BPNT di Desa Ngampel menunjukkan beberapa aspek efektivitas yang signifikan yaitu Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Desa Ngampel berhasil mengurangi tingkat kemiskinan dengan menyediakan akses pangan yang lebih terjangkau dan bergizi bagi masyarakat yang membutuhkan. Melalui pendampingan pemberdayaan, Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Desa Ngampel tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan pangan semata, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya dan peluang yang diberikan untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang. Respons masyarakat yang umumnya positif terhadap Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Desa Ngampel merupakan indikasi kuat bahwa program ini memberikan manfaat yang nyata dalam meningkatkan kualitas hidup mereka secara signifikan. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa bantuan BPNT dapat membantu efektivitas ketahanan pangan serta mengurangi kemiskinan yang terjadi di Desa Ngampel Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang.

Kata kunci : Eektivitas, Kebijakan, Kemiskinan, Pemerintah

PENDAHULUAN

Kebijakan publik dan program pembangunan merupakan misi utama pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Konstitusi Indonesia secara tegas menyatakan kewajiban ini dan menempatkan kesejahteraan sosial sebagai prioritas utama. Prinsip demokrasi ekonomi yang meliputi kesatuan perekonomian nasional, efisiensi yang berkeadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan hidup, kemandirian, dan kemajuan yang berimbang, ditegaskan dalam Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 yang mengatur perekonomian nasional.

Bukan hanya sekedar undang-undang, upaya mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga merupakan tujuan mulia perjuangan kemerdekaan negara ini. Nenek moyang bangsa ini telah lama menetapkan bahwa tujuan utama negara adalah kesejahteraan materi dan kekal bagi warga negaranya. Terdapat kewajiban moral bagi negara untuk membantu kelompok yang tidak berdaya untuk mendapatkan kemerdekaan dan martabat, sebagaimana tercantum dalam konstitusi, yang tidak hanya sekedar menetapkan peraturan.

Desa Ngampel, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, dan wilayah lain di Indonesia masih terus berjuang melawan kemiskinan meskipun sejumlah kebijakan dan program telah diterapkan. Perlu adanya upaya yang lebih besar dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kecamatan ini karena tingginya angka kemiskinan. Program yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat merupakan salah satu strategi yang populer.

Setelah kemerdekaan Indonesia, Bung Hatta menjadi terkenal dan terus menganjurkan Ideologi Ekonomi Populer. Pasal 33 UUD 1945 merupakan upaya terakhirnya untuk mengartikulasikan konsep tersebut. Esai tersebut menekankan bahwa negara mengendalikan segala sesuatu yang mempengaruhi kehidupan banyak orang. Segala sesuatu yang kaya akan sumber daya alam, termasuk tanah dan air, termasuk dalam kategori ini. Kemerdekaan diyakini akan mendatangkan kekayaan yang luas, bukan hanya pengaruh bagi segelintir orang saja.

Produk sistem politik yang paling terlihat dan mempunyai konsekuensi adalah kebijakannya. Program Nawacita yang dipelopori pemerintahan Presiden Joko Widodo bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur, melatih sumber daya manusia, dan meningkatkan perekonomian. Untuk itu, pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan yang tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat. Kebijakan Pemerintah Daerah di tingkat kota juga menjadi bagian dari hal ini.

Mengingat kondisi masyarakat dan perekonomian Indonesia saat ini, jelas bahwa kesejahteraan belum tercapai. Di Indonesia, Badan Perencanaan Nasional (Bapennas) dan Badan Pusat Statistik (BPS Nasional) telah mengidentifikasi delapan domain utama yang mencakup kesejahteraan: perumahan dan lingkungan, kesehatan dan gizi, pendidikan, lapangan kerja, tingkat dan pola konsumsi, perumahan dan kemiskinan, dan urusan sosial. Sesuatu yang lain. Statistik beban ketergantungan adalah 48,12% pada tahun 2017, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS Nasional) dan Badan Perencanaan Nasional (Bapennas). Artinya, dari setiap 100 penduduk produktif, terdapat sekitar 48 penduduk tidak produktif. Di bidang kesehatan, Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang sudah berada di bawah 10 kematian per 1.000 kelahiran hidup.

Salah satu permasalahan sosial dan ekonomi yang paling mendesak di Indonesia adalah kemiskinan, yang terutama terjadi di daerah pedesaan terpencil seperti Kecamatan Ngusikan di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Meskipun kabupaten ini kaya akan sumber daya manusia dan sumber daya alam, namun sebagian besar penduduknya hidup dalam kemiskinan. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan salah satu komponen strategi holistik dan jangka panjang untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah ini.

Tujuan dari pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah untuk memberikan masyarakat dan organisasi lebih banyak keagenan dalam kehidupan finansial mereka sendiri. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di Distrik Ngusikan, sektor korporasi, LSM, dan lembaga pemerintah telah meluncurkan sejumlah program pemberdayaan. Pelatihan keterampilan baru, pengenalan pendanaan, saran untuk dunia usaha, dan pembentukan jaringan pemasaran merupakan bagian dari inisiatif ini. Namun, masih diperlukan kajian lebih lanjut mengenai program-program ini untuk mengetahui dampak keseluruhannya dan apakah program tersebut bermanfaat atau tidak.

Penting untuk melakukan penelitian kualitatif mengenai efektivitas program pemberdayaan ekonomi dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Ngusikan. Dengan menggunakan taktik ini, peneliti dapat menyelidiki pengalaman hidup, perspektif, dan efek subyektif peserta dari program-program ini secara lebih mendalam. Faktor budaya, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi kelangsungan inisiatif pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat dapat lebih dipahami dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif.

Selain permasalahan ekonomi, terdapat beberapa permasalahan sosial budaya yang turut berkontribusi terhadap permasalahan kemiskinan di Kecamatan Ngusikan. Faktor-faktor yang memperbesar kemiskinan adalah ketergantungan pada pola ekonomi lama, kurangnya pendidikan, dan terbatasnya akses terhadap pengetahuan dan teknologi. Dengan membekali individu dengan

informasi, pelatihan, dan alat yang mereka perlukan untuk meningkatkan taraf hidup mereka, program pemberdayaan ekonomi bertujuan untuk mengatasi masalah ini.

Namun banyak kendala yang muncul ketika mencoba merealisasikan program pemberdayaan ekonomi. Ketidaktertarikan masyarakat lokal merupakan kendala utama. Banyak orang yang masih meragukan keefektifan program ini dan enggan berpartisipasi karena mereka belum sepenuhnya memahami manfaatnya. Selain itu, program tidak selalu terlaksana dengan baik karena pendanaan penyelenggara yang tidak berkelanjutan.

Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk mengetahui sejauh mana program pemberdayaan ekonomi di Kecamatan Ngusikan telah berhasil mengentaskan kemiskinan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi partisipan, focus group, dan wawancara mendalam. Setiap orang mulai dari peserta program hingga pelaksana program dan semua orang yang berkepentingan dengan hasil akan diwawancarai secara ekstensif. Untuk lebih memahami dampak program, kelompok masyarakat akan berpartisipasi dalam kelompok fokus. Dinamika dan interaksi yang terjadi sepanjang pelaksanaan program dapat dipahami lebih baik melalui observasi partisipatif.

Kajian kualitatif ini berupaya memahami perspektif masyarakat terhadap program pemberdayaan ekonomi dan unsur-unsur yang berkontribusi terhadap efektivitas program tersebut. Hasil yang ingin dicapai dari studi ini mencakup peningkatan program dan saran pembangunan di masa depan serta pemahaman yang lebih baik tentang cara mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi.

Kesimpulannya, penelitian ini diyakini dapat menjadi acuan bagi bidang-bidang lain yang menangani permasalahan serupa dan dapat menjadi tambahan yang signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Ngusikan. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diyakini bahwa kebijakan dan praktik yang lebih baik dapat dikembangkan dengan pemahaman yang lebih baik mengenai efektivitas program pemberdayaan ekonomi. Untuk regulasinya ditentukan langsung oleh Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Kabupaten Jombang.

LANDASAN TEORI

Kebijakan Publik

Yang dimaksud dengan “apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan” pada hakikatnya mengacu pada diskresi pemerintah dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu kebijakan (Sinaga, 2013: 56).

Istilah "kebijakan publik" juga dapat merujuk pada keputusan-keputusan yang saling terkait yang diambil oleh lembaga dan pejabat pemerintah di beberapa bidang yang berkaitan dengan tugas pemerintahan, seperti pertahanan nasional, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kejahatan, dan perencanaan kota (Dunn 1999: 107). Definisi lain dari kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat atau dibuat oleh pejabat dan lembaga pemerintah. Sangat mungkin bagi entitas swasta atau non-pemerintah untuk memberikan dampak terhadap pembuatan kebijakan publik dalam konteks ini. (Suharno, 2008:4).

Terdapat tiga elemen kebijakan yang membentuk sistem kebijakan. Dye menggambarkan tiga elemen kebijakan tersebut sebagai kebijakan publik/public policy, pelaku kebijakan/policy stakeholders, dan lingkungan kebijakan/policy environment. Berdasarkan uraian diatas, kebijakan publik merupakan suatu rangkaian tindakan-tindakan atau kegiatan dilakukan oleh stakeholder yang terdapat kesempatan atau hambatan dalam pelaksanaan yang berguna untuk kepentingan orang banyak agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Dunn 2003:11).

Pengertian Efektivitas dan Indikatornya

Agar efektif, suatu kegiatan harus memanfaatkan sumber daya, sarana, dan prasarannya sampai batas tertentu agar dapat menghasilkan sejumlah barang yang sesuai dengan tujuan kegiatan tersebut. Apabila tujuan yang telah ditetapkan benar-benar tercapai, maka ukuran efektivitasnya

adalah keberhasilan. Tingkat kemandirian yang lebih besar ditunjukkan oleh hasil yang lebih dekat dengan tujuan. “Efficacy” sebagai orientasi kerja mengandung arti bahwa fokus utama adalah pada pemenuhan tujuan yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu dengan bantuan sumber daya yang telah ditentukan (Siagian 2005:171).

Orang dan tim sama pentingnya bagi keberhasilan organisasi. Berfokus pada keluaran anggota tim atau pekerja tertentu adalah apa yang kita maksud ketika kita berbicara tentang efektivitas individu. Biasanya, suatu pekerjaan atau posisi dalam suatu organisasi akan menentukan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Prestasi kerja merupakan ukuran seberapa efektif suatu pekerjaan. Nilai suatu kelompok tergantung pada upaya individu masing-masing anggotanya. Ketika orang-orang bekerja sama, mereka dapat mencapai lebih banyak dibandingkan jika mereka bekerja sendiri. Salah satu cara untuk melihat efektivitas organisasi adalah sebagai ukuran seberapa baik perusahaan berinteraksi dengan lingkungannya.

Ada empat faktor yang mempengaruhi Efektivitas organisasi yaitu :

1. Karakteristik organisasi terdiri dari struktur organisasi dan teknologi struktur adalah cara organisasi untuk menyusun orang-orang untuk menciptakan sebuah organisasi.
2. Karakteristik lingkungan mencapai dua aspek yang saling berhubungan yaitu lingkungan ekstren dan lingkungan intern. Lingkungan ekstren yaitu semua lingkungan kekuatan yang timbul diluar batasan-batasan organisasi. Lingkungan intern pada umumnya dikenal sebagai iklim organisasi yang meliputi bermacam-macam atribut-atribut lingkungan saja.
3. Karakteristik lingkungan dalam bekerja memiliki pandangan tujuan kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda individu ini memiliki pengaruh langsung terhadap rasa keterkaitan pada organisasi dan prestasi kerja.
4. Kebijakan dan praktek manajemen dibutuhkan suatu organisasi untuk mewujudkan suatu keberhasilan melalui perencanaan, koordinasi, sehingga dapat memperlancar kegiatan yang dituju kearah sasaran (Richard, M. Streert 2004:205).

Langkah pertama dalam membahas efektivitas adalah memiliki pemahaman yang baik tentang tujuan atau sasaran organisasi. Dalam kebanyakan kasus, hal ini mempunyai hubungan yang erat dengan hasil yang diinginkan organisasi. Efisiensi adalah istilah multi-segi yang mencakup beberapa faktor baik di dalam maupun di luar perusahaan.

Kemandirian yang dirasakan berasal dari suatu kriteria dalam ilmu administrasi yang meresapi setiap aspek keberadaan manusia dalam mengejar keinginan seseorang. Efisiensi dan rasionalitas adalah dua aspek administrasi yang harus diperhatikan dalam setiap evaluasi ilmiah. Salah satu aspek tersebut adalah efektivitas. Elemen yang dianggap kriteria kemandirian meliputi:

1) Ketepatan Waktu

Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Demikian pula halnya akan sangat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi, penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

2) Ketepatan Perhitungan Biaya

Ketepatan dalam pemanfaatan biaya terhadap sesuatu kegiatan, dalam arti bahwa tidak mengalami kekurangan sampai kegiatan itu dapat diselesaikan.

3) Ketepatan Dalam Pengukuran

Ketepatan ukuran yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau tugas yang dipercayakan kepada kita adalah merupakan bagian dari keefektifan.

4) Ketepatan Sasaran

Sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individual maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi (Makmur 2011:7).

Definisi Efisiensi

Hasil optimal dengan sumber daya terbatas adalah apa yang kami maksud ketika berbicara tentang efisiensi. Ini juga merupakan cara ideal untuk membandingkan input dan output, atau hasil pendapatan dan sumber daya yang dikeluarkan. Karena efisiensi adalah ukuran hubungan antara output dan input, maka efisiensi sering dikaitkan dengan kinerja organisasi (Ritaudin, 2015).

Jika rasio output terhadap input besar, maka efisiensi produksi tinggi; sebaliknya, jika rasio input terhadap output kecil, maka efisiensinya rendah. Dalam proses produksi yang efisien, harga suatu input sama dengan nilai produk marjinalnya, yang berarti bahwa jumlah input yang dibutuhkan paling sedikit untuk mendapatkan output yang maksimal. Susantun Indah (2000:201)

Upaya untuk memaksimalkan output dalam jangka waktu tertentu sambil meminimalkan penggunaan sumber daya yang sia-sia (termasuk namun tidak terbatas pada tenaga kerja manusia, barang material, energi, dan waktu) dikenal sebagai efisiensi (The Liang Gie, 1981).

Pengukuran efisiensi dapat dilakukan dengan dua metode pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan tradisional, yaitu pengukuran efisiensi yang didasarkan pada besarnya investasi atau modal yang telah ditanamkan untuk memproduksi suatu produk tertentu, misalnya dengan ukuran ROI (Return of Investment). Pendekatan lain yang sering digunakan adalah pendekatan rasio input- output. BOPO (biaya operasional-pendapatan operasional) diukur secara kuantitatif untuk mengukur efisiensi. Melalui rasio ini diukur apakah manajemen sebuah institusi telah menggunakan semua faktor produksinya dengan efektif dan efisien. Adapun efisien usaha bank diukur dengan menggunakan rasio operasional dibandingkan dengan pendapatan operasi (BOPO).
- b. Pendekatan Terkini, yaitu pengukuran efisiensi yang merujuk pada kemampuan UKE untuk menontrol biaya dan menentukan hasil, salah satu caranya adalah dengan DEA (Data envelopment Analysis), yang didasarkan pada pemrograman linier, semua penyimpangan yang terjadi pada estimasi di masa yang akan datang tergambarkan pada inefisiensi (Noulas & Glavelli, 2002: 3-4)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Efisiensi adalah perbandingan output dengan input digunakan untuk mengukur kinerja suatu unit kegiatan ekonomi untuk untuk mencapai prestasi yang sebesar-besarnya dengan menggunakan kemungkinan kemungkinan yang tersedia. Efisiensi dibagi menjadi dua jenis yakni, efisiensi teknis dan efisiensi ekonomis.

Ketahanan Pangan

Konsep ketahanan pangan (food security) lebih luas dibandingkan dengan konsep swasembada pangan, yang hanya berorientasi pada aspek fisik kecukupan produksi bahan pangan. Beberapa ahli sepakat bahwa ketahanan pangan minimal mengandung dua unsur pokok, yaitu ketersediaan pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap bahan pangan tersebut. Sub sistem ketahanan pangan terdiri dari tiga sub sistem utama, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan penyerapan pangan. sedangkan status gizi merupakan outcome dari ketahanan pangan. Sub sistem yang harus dipenuhi secara utuh antara lain ketersediaan pangan, akses pangan, dan penyerapan pangan. Apabila salah satu dari sub sistem tersebut tidak terpenuhi maka suatu negara belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik. Individu yang akses untuk memperoleh kebutuhan pangannya tidak merata, maka ketahanan pangannya masih dikatakan rapuh (Husry, 2020).

Ketahanan pangan dijelaskan dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2012 adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan tersebut, maka perlu memperhatikan tiga komponen pokok yang harus dipenuhi, yaitu: (1) Ketersediaan pangan yang cukup dan merata; (2) Keterjangkauan pangan yang efektif dan efisien; serta (3) Konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang.

Butar-Butar (2016) menjelaskan, konsep pelaksanaan diversifikasi pangan selaras dengan konsep ketahanan pangan (food security) yang diadopsi dari empat pilar yang menopang ketahanan pangan dari definisi ketahanan pangan dari Food and Agricultural Organization (FAO) yang berpedoman pada Undang-undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan yaitu sebagai berikut:

1. Aspek ketersediaan pangan (food availability)
Aspek ketersediaan tersebut merujuk pada pengertian pangan yang diperjualbelikan atau prinsip pasar (market). Ketersediaan dapat dipenuhi melalui cara menanam sendiri dari membeli dengan cara impor. Cara tersebut menjadi cara alternatif yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek.
2. Aspek stabilitas ketersediaan/pasokan (stability of supplies)
Ketahanan pangan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kecukupan pangan masyarakat dari waktu ke waktu. Kecukupan tersebut dapat dimaksudkan sebagai kecukupan kuantitas maupun kualitas, baik dengan menggunakan prinsip memproduksi sendiri maupun membeli dengan cara impor.
3. Akses keterjangkauan (access to supplies)
Ketahanan pangan salah satunya diwujudkan berdasarkan prinsip bahwa ketersediaan pangan harus dapat dijangkau oleh seluruh lapisan pendapatan masyarakat. Aspek keterjangkauan ini berarti masyarakat memfokuskan terhadap sesuatu yang mempengaruhi keseimbangan permintaan dan penawaran komoditi pangan. Hal tersebut berarti keterjangkauan akan memperhatikan aspek kuantitas dan keberagaman pilihan komoditas pangan, sehingga harga komoditas pangan akan lebih terjangkau oleh seluruh lapisan pendapatan.
4. Aspek konsumsi (food utilization)
Aspek konsumsi pangan difokuskan pada penyediaan pangan yang bermutu dan bergizi sehingga dapat dikonsumsi oleh keluarga ataupun masyarakat. Selain mutu dan gizi, yang perlu diperhatikan adalah aspek kehalalan, terlebih untuk negara-negara mayoritas muslim seperti di Indonesia. Selain itu mutu dan gizi pangan yang dikonsumsi akan berdampak pada pembentukan kualitas sumber daya manusia di suatu negara.

Konsep Kemiskinan

Bahkan mereka yang hidup dalam kemiskinan pun dapat memanfaatkan peluang yang sudah tersedia secara efektif. Akibatnya, individu bergantung pada bantuan dari luar, meskipun bantuan tersebut tidak selalu dapat diandalkan. Masyarakat berpendapat bahwa strategi pemberdayaan ini tidak akan berhasil karena tidak ada komunitas yang dapat berkembang jika sendirian. Akibat kesendirian, orang menjadi tidak aktif dan keadaan menjadi lebih buruk (Hikmat, 2004:06).

Garis kemiskinan adalah metrik yang paling banyak digunakan di Indonesia. Seseorang dianggap hidup di bawah garis kemiskinan jika pengeluaran sehari-harinya tidak dapat menutupi kebutuhan dasar perumahan, bahan bakar, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan makanan (Priebe, 2014). Selain Bank Dunia dan BPS, Sayogyo juga memiliki indikator yang berdasarkan pengeluaran rumah tangga dalam rupiah. Indikator ini sama dengan jumlah kilogram beras yang dimakan per orang per tahun, dibagi berdasarkan wilayah pedesaan dan perkotaan (Rustiadi et al., 2011:08).

Klasifikasi kemiskinan perkotaan dan pedesaan. Indeks di daerah pedesaan adalah:

- a. Miskin: bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 320 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
- b. Miskin sekali: bila pengeluaran Memahami Karakter Kemiskinan Perkotaan... (Pitri Yandri, Bambang Juanda) 77 keluarga lebih kecil dari pada 240 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
- c. Paling miskin: bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 180 kg nilai tukar beras per orang per tahun.

Di daerah perkotaan indikatornya :

- a. Miskin: bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 480 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
- b. Miskin sekali: bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 380 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
- c. Paling miskin: bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 270 kg nilai tukar beras per orang per tahun. Pengelompokkan itu ditujukan untuk menghasilkan pengukuran yang lebih akurat (Asra, 1999). Apalagi terdapat fakta bahwa karakteristik perdesaan dan perkotaan berbeda secara spasial yang mengakibatkan berbedanya biaya hidup (Asra, 2000:19).

Memahami Kemiskinan Perkotaan Salah satu permasalahan yang muncul akibat urbanisasi dan diperburuk dengan penyebaran kota adalah kemiskinan. Hal ini terkait dengan meningkatnya tuntutan akibat tren urbanisasi saat ini, termasuk kebutuhan untuk menciptakan lapangan kerja, memenuhi permintaan akan perumahan dan layanan ekonomi, serta membangun infrastruktur yang diperlukan. Misalnya Hall (2004:03).

Dapat dikatakan bahwa metode berpikir dan bertindak yang lama dan konvensional masih menjadi hal yang lumrah dalam kaitannya dengan pertumbuhan dan perbaikan perkotaan di Indonesia. Dengan kata lain, pembangunan dan perbaikan seringkali hanya dilakukan ketika terjadi masalah atau kerusakan. Oleh karena itu, agar kota-kota di Indonesia benar-benar berkelanjutan, diperlukan metode berpikir baru dalam menciptakan atau mengembangkannya. Cara berpikir ini harus mencakup pendekatan yang kreatif, inventif, dan penuh ide. Dikatakan juga bahwa pembangunan berkelanjutan adalah (Budihardjo, 1999). Kemajuan yang dapat memenuhi tuntutan saat ini tanpa membahayakan kapasitas masa depan untuk melakukan hal yang sama. Meskipun demikian, terdapat sejumlah inovasi dalam pemikiran dan konsep terkait keberlanjutan yang masih perlu diungkapkan. Selain itu, pertumbuhan, pemberdayaan masyarakat (yang menghasilkan pemberdayaan diri), kesetaraan, dan lingkungan yang bebas kerusakan merupakan komponen penting dari pembangunan kota berkelanjutan (Aula 2004:06).

Konsep Penanggulangan Kemiskinan

Ketika masyarakat tidak memiliki cukup uang untuk menutupi biaya hidup yang penting, hal itu disebut kemiskinan. Kemiskinan, dengan kata lain, diartikan sebagai “ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar” yang menimbulkan kekhawatiran atau kekurangan sumber daya di setiap kesempatan (Hartomo 2011:327).

Ketika kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, seseorang hidup dalam kemiskinan yang parah. Di antara kebutuhan yang paling mendasar adalah sebagai berikut: makanan, tempat tinggal, pakaian, perawatan medis, keamanan, otonomi, ekspresi, dan rekreasi. Orang-orang jatuh ke dalam kemiskinan subsisten ketika pendapatan mereka rendah dan kebutuhan mendasar mereka, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tidak terpenuhi. Kurangnya mekanisme perlindungan yang efektif terhadap hak-hak dan kebutuhan mendasar, atau budaya kekerasan yang merajalela, menyebabkan masyarakat hidup dalam kemiskinan. Ketika orang-orang tertindas atau terlibat dalam interaksi eksploitatif satu sama lain atau dengan alam, hal ini menyebabkan kurangnya rasa cinta. Ketika pendidikan tidak mencukupi secara kuantitas dan kualitas, hal ini akan memperburuk masalah dalam memahami kemiskinan. Pemberlakuan cita-cita asing terhadap budaya lokal menyebabkan terkikisnya nilai-nilai sosial budaya yang ada, sedangkan diskriminasi dan marginalisasi individu serta proses pengambilan keputusan menyebabkan kemiskinan partisipasi (Thamrin 2009:11).

Agar individu, kelompok, keluarga, dan komunitas mempunyai kenikmatan sosial, penting untuk memenuhi kebutuhan sosial mereka. Persyaratan biologis, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, dan interaksi sosial yang harmonis semuanya termasuk dalam kategori ini, dan masyarakat yang mampu memberikan peluang sosial kepada anggotanya untuk tumbuh dan mencapai potensi maksimalnya adalah masyarakat yang pada akhirnya mencapai kesejahteraan sosial. Sebagai serangkaian kegiatan yang diselenggarakan bersama, kesejahteraan (juga dikenal

sebagai kesejahteraan sosial) berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan material, sosial, dan spiritual masyarakat dengan membina hubungan interpersonal yang lebih baik dan meningkatkan standar hidup sesuai dengan norma-norma masyarakat (Sutyastie 2002:34).

Ada dua aliran pemikiran utama dalam mengatasi kemiskinan: aliran pemikiran budaya dan aliran pemikiran struktural atau situasional. Ketika mempelajari kemiskinan, masing-masing sudut pandang mempunyai asumsi, sumber, dan metode yang unik (Usman 2010: 128).

Sebaliknya, pandangan situasional mengaitkan kemiskinan dengan hasil sistem ekonomi yang mengutamakan akumulasi modal dan barang-barang berteknologi maju. Dalam hal ini, hal ini timbul dalam program-program pembangunan yang mengabaikan distribusi hasil-hasil pembangunan demi pertumbuhan. Untuk memaksimalkan produksi pangan guna memenuhi kebutuhan nasional, program-program ini antara lain bertujuan untuk mengintensifkan, memperluas, dan mengkomersialkan pertanian. Meskipun program-program pembangunan ini telah meningkatkan hasil industri secara signifikan, program-program tersebut masih di luar jangkauan sebagian besar masyarakat (Usman 2010:129).

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Kualitatif, sebagaimana diketahui metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2016:15).

Penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena yang terjadi pada pengelolaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Ngusikan.

Objek Penelitian

Menurut definisi yang dikemukakan oleh Sugiyono (2020:19), objek penelitian merujuk pada suatu sifat, ciri, atau nilai yang dimiliki oleh seseorang, benda, atau aktivitas yang menunjukkan variasi tertentu. Objek penelitian ini dipilih oleh peneliti dengan tujuan untuk dikaji secara mendalam, dianalisis, dan diinterpretasikan sehingga dapat diambil kesimpulan yang relevan dan bermakna. Dalam konteks penelitian tentang efektivitas program pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam mengurangi kemiskinan di Kecamatan Ngusikan, objek penelitian menjadi fokus utama yang menjadi subjek analisis dan observasi untuk memahami fenomena yang sedang diteliti.

Selain itu, objek penelitian tentang efektivitas program pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Ngusikan juga akan terus mengalami variasi dan perubahan seiring berjalannya penelitian. Hal ini disebabkan oleh adanya perkembangan analisis dan temuan yang ditemukan selama proses penelitian berlangsung, yang dapat memengaruhi pemahaman tentang objek penelitian serta perumusan kesimpulan akhir dalam skripsi. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang objek penelitian tentang efektivitas program pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Ngusikan menjadi kunci dalam menjalankan penelitian secara efektif dan menghasilkan kesimpulan yang valid dan relevan.

Subjek Penelitian

Menurut Arikunto (2021:78), subjek penelitian dapat diartikan sebagai suatu kesatuan, baik berupa benda, individu, atau fenomena, yang terkait dengan variabel-variabel penelitian dan menjadi fokus utama penyelidikan. Subjek penelitian memainkan peran yang sangat penting dalam proses penelitian karena menjadi sumber data yang memberikan informasi tentang variabel yang diamati. Dalam konteks skripsi tentang efektivitas kebijakan ketahanan pangan untuk mengurangi

kemiskinan di desa Ngusikan, subjek penelitian dapat merujuk pada berbagai entitas yang terlibat dalam program tersebut.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Ngampel, sebuah desa di kecamatan Ngusikan yang terletak di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan Ngusikan berada di bagian utara Kabupaten Jombang dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Lamongan di sebelah utara serta Kabupaten Mojokerto di sebelah timur. Kecamatan Ngusikan merupakan hasil pemekaran wilayah dari Kecamatan Kudu yang dilakukan pada awal tahun 2000-an, tepatnya sekitar tahun 2001. Pemekaran ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas administrasi dan pelayanan publik di daerah tersebut. Kecamatan Ngusikan memiliki berbagai potensi ekonomi dan sosial yang menjadikannya lokasi yang tepat untuk meneliti efektivitas program pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam mengurangi kemiskinan. Penelitian di wilayah ini diharapkan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi program pemberdayaan ekonomi dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.

Informan

Dalam proses penelitian, pemilihan informan merupakan langkah krusial untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Pemilihan informan yang tepat dapat memberikan wawasan yang kaya dan beragam, serta memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif terhadap topik penelitian. Dalam konteks penelitian efektivitas program pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Ngusikan, pemilihan informan dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa data yang diperoleh relevan, akurat, dan beragam.

Dalam penelitian ini, informan terdiri dari tiga kelompok utama, yaitu Kepala Desa, Pendamping Pemberdayaan, dan masyarakat. Setiap kelompok informan memiliki peran dan kontribusi yang berbeda dalam konteks program pemberdayaan ekonomi. Kepala, sebagai pemimpin administratif di tingkat desa, memiliki akses ke berbagai data dan informasi resmi terkait program di wilayahnya. Pendamping pemberdayaan, di sisi lain, berperan langsung dalam mendampingi dan memberikan bimbingan kepada masyarakat penerima manfaat. Sementara itu, masyarakat sebagai subjek utama program pemberdayaan ekonomi memiliki pengalaman dan persepsi yang berharga tentang implementasi program dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah figur yang memiliki peran penting dalam administrasi desa dan merupakan ujung tombak dari pelaksanaan program-program pemerintah di tingkat desa. Sebagai pemimpin administratif di desa, Kepala Desa memiliki pemahaman yang mendalam tentang kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Desa yang berada di Kecamatan Ngusikan. Dengan posisi dan wewenangnya yang strategis, Kepala Desa memiliki akses ke berbagai data dan informasi resmi terkait program pemberdayaan ekonomi, termasuk alokasi anggaran, perencanaan, dan pelaksanaan program di tingkat desa. Memilih Kepala Desa sebagai informan sangatlah relevan karena beliau dapat memberikan perspektif yang komprehensif tentang efektivitas program pemberdayaan ekonomi di desanya, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasinya.

2. Pendamping Pemberdayaan

Pendamping pemberdayaan adalah individu yang secara aktif terlibat dalam mendampingi dan memberikan bimbingan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi. Mereka bekerja langsung di lapangan, berinteraksi dengan masyarakat, dan menyediakan bantuan teknis serta pelatihan yang diperlukan. Memilih pendamping pemberdayaan sebagai informan merupakan langkah yang strategis karena mereka memiliki

pengetahuan praktis yang mendalam tentang keadaan masyarakat, kebutuhan mereka, serta dinamika implementasi program. Informasi yang diberikan oleh pendamping pemberdayaan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang dampak program pemberdayaan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat penerima manfaat.

3. Masyarakat

Masyarakat adalah subjek utama dari program pemberdayaan ekonomi. Mereka adalah individu atau kelompok yang langsung menerima manfaat dari program tersebut. Dengan berinteraksi langsung dengan masyarakat, peneliti dapat menggali pemahaman yang lebih dalam tentang persepsi, pengalaman, dan harapan mereka terhadap program pemberdayaan ekonomi. Selain itu, melibatkan masyarakat sebagai informan memungkinkan peneliti untuk memahami secara langsung dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan program. Dengan mendengarkan suara masyarakat, peneliti dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin tidak terlihat dari perspektif lain dan menemukan solusi yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara menggali informasi melalui informan. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh melalui teknik yang lain sebelumnya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif (Muri, 2014)

3. Observasi

Metode observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata dan dibantu dengan panca indera lainnya. Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, mencium, atau mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudiannya menyimpulkan dari apa yang ia amati itu. Pengamat adalah kunci keberhasilan dan ketepatan hasil penelitian (Muri, 2014).

Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam konteks penelitian kualitatif merupakan suatu proses yang kompleks dan sistematis dalam mengolah data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara, observasi lapangan, catatan, dan dokumentasi. Proses ini bertujuan untuk menyusun, mengorganisasi, dan menginterpretasi data sehingga dapat dihasilkan pemahaman yang mendalam dan terinci terkait dengan fenomena yang diteliti. Emzir (2010:128) menjelaskan bahwa terdapat tiga kegiatan utama dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan kesimpulan.

Pertama, reduksi data merupakan langkah awal dalam analisis data kualitatif yang melibatkan pemilihan, penyaringan, dan pemfokusan data yang relevan. Proses ini bertujuan untuk mempertajam pemahaman terhadap data dengan cara mengeliminasi informasi yang tidak relevan atau repetitif, serta menyusunnya dalam suatu cara yang lebih terstruktur dan fokus. Reduksi data juga melibatkan pembuangan data yang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap

pemahaman fenomena yang diteliti, sehingga dapat memudahkan peneliti dalam merumuskan kesimpulan akhir.

Kedua, model data merupakan langkah lanjutan dalam analisis data yang melibatkan pembentukan kumpulan informasi yang tersusun secara terstruktur dan praktis. Model data ini dirancang untuk merangkum hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya, termasuk deskripsi kesimpulan dan rekomendasi tindakan yang dapat diambil. Melalui model data, peneliti dapat menyusun informasi dalam bentuk yang mudah diakses dan dipahami, sehingga memudahkan dalam memvisualisasikan apa yang telah terjadi dan menggambarkan kesimpulan yang dapat dijustifikasi dengan baik.

Ketiga, penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data kualitatif yang melibatkan sintesis dari berbagai informasi dan temuan yang telah dihasilkan. Proses ini mencakup verifikasi terhadap kesimpulan yang telah diperoleh, serta penyusunan kesimpulan secara komprehensif berdasarkan analisis data yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian memerlukan kejelian dalam menyimpulkan temuan-temuan yang relevan dan signifikan, serta memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan didukung oleh data yang dianalisis dengan cermat. Kesimpulan yang diperoleh kemudian dapat diverifikasi kembali sesuai dengan proses verifikasi yang dilakukan oleh peneliti, sehingga memastikan kevaliditasan dan keakuratan dari hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ketahanan Pangan di Desa Ngampel

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Jombang pada tahun 2019 adalah sebesar 9,22 persen, mengalami penurunan sebesar 3,56 persen jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2018. Bila melihat persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur maupun

Nasional pada tahun yang sama dimana persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur sebesar 10,37 persen sedangkan persentase penduduk miskin secara Nasional adalah sebesar 8,63 persen, maka persentase penduduk miskin Kabupaten Jombang berada di bawah capaian Provinsi Jawa Timur dan berada di atas capaian Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan capaian indikator persentase penduduk di Kabupaten Jombang pada tahun 2019 sangat relevan terhadap kemajuan capaian indikator yang sama di Provinsi Jawa Timur maupun nasional.

Perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Jombang selama periode 2015-2019 menunjukkan trend menurun dengan rata-rata penurunan persentase penduduk miskin sebesar 3,81 persen per tahun.

Perkembangan tingkat kemiskinan dengan trend menurun tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan dan program yang telah diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dalam rangka menurunkan persentase penduduk miskin dapat berjalan dengan efektif dan berdampak positif dalam mengurangi angka kemiskinan. Selama periode 2015-2019, perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Jombang menunjukkan trend yang sama (relevan) dengan perkembangan di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun secara Nasional. Meskipun memiliki trend yang relevan, akan tetapi rata-rata penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Jombang sebesar 3.81 persen, masih lebih rendah dari rata-rata penurunan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur yang mencapai 4.24 persen dan 3.93 persen untuk rata-rata penurunan di tingkat Nasional.

Perkembangan tingkat kemiskinan yang menunjukkan relevansi antara perkembangan di Kabupaten Jombang dengan di Provinsi Jawa Timur maupun Nasional menjadi indikasi bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Jombang dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Upaya yang telah dilakukan diantaranya dengan melakukan sinkronisasi program- program kemiskinan agar terarah, efektif dan tepat sasaran baik dengan Provinsi Jawa Timur maupun dengan Pemerintah Pusat dan bantuan-bantuan lainnya baik berupa hibah maupun bantuan lainnya yang mendukung pengentasan kemiskinan.

Analisis prioritas bidang kemiskinan Kabupaten Jombang, nampak perkembangan indikator tingkat kemiskinan adalah belum sejalan dengan perkembangan indikator indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan karena adanya perkembangan capaian dari tahun sebelumnya. Dengan demikian juga menunjukkan rendahnya keterkaitan dari indikator tersebut yang ditunjukkan dengan perkembangan indikator tingkat kemiskinan di Kabupaten Jombang tidak konsisten dengan indikator indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indikator yang terutama masih memerlukan prioritas penanganan adalah pada indikator indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Jombang, yang menunjukkan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Jombang.

Sementara di bidang kemiskinan dan ketenagakerjaan Kabupaten Jombang, nampak perkembangan indikator tingkat kemiskinan adalah konsisten dengan perkembangan bidang ketenagakerjaan yang ditunjukkan oleh indikator tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja karena adanya perkembangan capaian dari tahun sebelumnya. Ini berarti bahwa faktor pengangguran memiliki pengaruh signifikan terhadap kondisi kemiskinan. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Jombang yang konsisten meningkat dari tahun 2015 sampai 2019 sejalan dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka dan berdampak pada turunnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Jombang.

Pemerintah telah melaksanakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga secara layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat serta percepatan pembangunan daerah untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Namun, pengentasan permasalahan kemiskinan ini bukan hanya kewajiban dari Pemerintah, melainkan masyarakat pun harus menyadari bahwa penyakit sosial ini adalah tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan data BPS, selama 5 (lima), angka kemiskinan Kabupaten Jombang terus mengalami penurunan. Tahun 2015 angka kemiskinan Kabupaten Jombang sebesar 10,79% menurun menjadi 10,48% di tahun 2017 dan menjadi 9,22% di tahun 2019 (Data per April 2020). Persentase capaian ini masih lebih rendah dari capaian propinsi yang sebesar 12,34% tahun 2015, sebesar 11,77% tahun 2017, dan sebesar 10,37% tahun 2019. Sedangkan angka

kemiskinan nasional tahun 2015 sebesar 11,13% turun menjadi 10, 12% tahun 2017, dan terakhir menjadi 9,41% tahun 2019. Sehingga diperlukan percepatan upaya penanggulangan kemiskinan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan.

Dari hal tersebut, maka pemantauan program pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang sedang berjalan menjadi penting untuk diberlakukan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No 10 tahun 2020 tentang APBD Perubahan Kabupaten Jombang tahun 2020,

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No 14 tahun 2016 tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No 1 tahun 2020 tentang RPJMD kabupaten Jombang tahun 2018-2023, arahan dari Undang-Undang no 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui pendekatan wilayah, dan Peraturan Menteri Sosial No 10 Tahun 2016 tentang mekanisme penggunaan dana terpadu program penanganan fakir miskin, dalam upaya menurunkan tingkat angka kemiskinan sesuai target penurunan yang telah ditetapkan baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah sangat tergantung pada komitmen, kemampuan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan serta didukung dengan anggaran yang memadai. Penanggulangan kemiskinan dapat terlaksana dengan baik jika seluruh stakeholder saling bekerja sama dan bersinergi dengan baik tidak hanya peran pemerintah tetapi juga dibutuhkan peran serta masyarakat secara aktif. Peran pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk kehidupan masyarakat yang berkelanjutan dan berkesinambungan agar menciptakan integritas nasional sesuai UUD 1945. Untuk itu penting untuk mengetahui sejauhmana capaian indikator di dalam program yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten

Jombang melalui TKPKD dalam penanggulangan kemiskinan agar dapat melakukan rencana tindak lanjut ke depan melalui program-program yang inovatif, strategis, menyeluruh dan berkelanjutan yang akan berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan secara signifikan, dengan hal tersebut akan menjadikan sebagai indikator yang sangat penting dalam pembangunan wilayah Kabupaten Jombang. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dilakukan penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Jombang Tahun 2020. Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) ini merupakan laporan pelaksanaan dan capaian program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jombang. Laporan ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan koordinasi antara Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota, yang diatur dalam Bab Hubungan Kerja dan Tata Kerja, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010.

Peran dari pemerintah sangat diperlukan, mengingat kebijakan dan peraturan yang dibuat menjadi acuan dalam mendorong kearah pembangunan. Program- program mengenai pengentasan kemiskinan, dimulai oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yaitu bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah- langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan tersebut, kemudian diciptakannya sebuah inovasi program Bantuan yang bernama Bantuan Pangan Non Tunai. Menurut (Susanto, 2020) Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan Bank (Pedoman Pelaksanaan BPNT). Fungsi pelaksanaan diadakannya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain yaitu 1. Meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. 2. Meningkatkan transaksi non tunai sesuai dengan program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang digagas oleh Bank Indonesia. 3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). 4. Meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial. 5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mulai dilaksanakan di Kabupaten Jombang khususnya di Desa Ngampel Kecamatan Ngusikan .Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Ngampel Kecamatan ngusikan Kabupaten Jombang ini disalurkan melalui Pembagian langsung oleh Dinas sosial Melalui desa dan ditentukan sebagai tempat di Desa Ngampel. Namun permasalahan yang terjadi di lapangan masih banyak penerima bantuan pangan non tunai yang belum tepat (tepat sasaran penerima manfaat, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat waktu, tepat administrasi, dan tepat kualitas. Hal ini tentu menjadi salah satu perhatian karena dapat menimbulkan ketidakefektivan pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini.

Berhasil atau tidaknya program pemerintah, dapat dilihat dari tercapai atau tidak tercapainya tujuan dari program tersebut. Target adanya suatu program penanggulangan kemiskinan tidak hanya bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan, namun juga berupaya untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya melalui pelaksanaan yang efektif sehingga tujuan dapat tercapai. Keberhasilan suatu program dapat dilihat melalui pengukuran efektivitas. (Makmur, 2011), menjelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari indikator-indikator ketepatan penentuan waktu, ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan dalam menentukan tujuan, dan ketepatan-ketepatan sasaran. Oleh karena itu, pengukuran efektivitas diperlukan karena efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan, atau program.

Hasil Wawancara Mengenai Program Bantuan Pangan Non-Tunai

Ketahanan pangan merupakan isu krusial yang berperan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan, terutama di daerah-daerah pedesaan. Salah satu inisiatif pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan ini adalah melalui Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Program ini dirancang untuk memberikan bantuan pangan pokok kepada keluarga kurang mampu secara non-tunai, dengan tujuan memastikan bantuan tersebut tepat sasaran dan dapat mengurangi angka kemiskinan secara signifikan.

Dalam rangka mengevaluasi efektivitas kebijakan ini, peneliti melakukan serangkaian wawancara mendalam dengan berbagai pihak di Desa Ngampel. Desa ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang representatif dari daerah-daerah pedesaan di Indonesia yang menerima program BPNT.

Peneliti melakukan wawancara dengan tiga kelompok narasumber utama, yaitu Kepala Desa Ngampel, Pendamping Pemberdayaan Masyarakat, dan masyarakat penerima BPNT. Kepala Desa memberikan pandangan mengenai implementasi program dari perspektif pemerintahan desa, termasuk tantangan yang dihadapi dalam memastikan bantuan sampai kepada yang berhak. Pendamping Pemberdayaan Masyarakat, sebagai pihak yang langsung terlibat dalam pelaksanaan program, memberikan wawasan tentang proses pendistribusian bantuan, koordinasi antar lembaga, serta hambatan-hambatan teknis yang ditemui di lapangan. Sementara itu, masyarakat penerima BPNT memberikan penilaian langsung mengenai dampak bantuan yang mereka terima terhadap kesejahteraan keluarga dan ketahanan pangan mereka sehari-hari.

Hasil wawancara ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas Program Bantuan Pangan Non-Tunai di Desa Ngampel. Dari perspektif Kepala Desa, Pendamping Pemberdayaan, dan masyarakat penerima, peneliti berupaya mengidentifikasi aspek-aspek yang berhasil maupun yang perlu diperbaiki dalam program ini. Temuan-temuan ini nantinya akan dianalisis lebih lanjut untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam mencapai tujuan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan di desa-desa lain yang menghadapi permasalahan serupa.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan evaluasi terhadap implementasi program di Desa Ngampel, tetapi juga berkontribusi dalam penyusunan strategi yang lebih baik untuk program-program bantuan pangan di masa depan. Untuk jadwal penyaluran bantuan non tunai ditentukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang.

Masyarakat Penerima

Untuk melihat perspektif masyarakat penerima manfaat terhadap Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Desa Ngampel, kita dapat melihat dari berbagai sudut pandang yang diungkapkan melalui wawancara langsung dengan mereka. Pertama, masyarakat mengakui bahwa pemahaman mereka tentang program BPNT didukung dengan baik oleh pendamping BPNT yang merupakan bagian dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Pendamping ini tidak hanya memberikan edukasi tentang proses registrasi, pencairan, dan penggunaan bantuan, tetapi juga terlibat aktif dalam rapat koordinasi bulanan di Dinas Sosial, yang memberikan pembaruan informasi terkait program. Meskipun demikian, beberapa masyarakat menyampaikan kekhawatiran terkait ketepatan sasaran program, di mana ada keluarga yang seharusnya tidak lagi memenuhi syarat namun masih menerima bantuan, sementara keluarga lain yang membutuhkan tidak terdaftar sama sekali. Mereka berharap ada peningkatan dalam pemantauan dan pemutakhiran data secara lebih teratur untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan. Berikut merupakan pendapat dari narasumber mengenai hal ini:

“Sebenarnya, program ini sangat baik. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Misalnya, saya melihat ada beberapa keluarga yang seharusnya sudah tidak memenuhi syarat tapi masih menerima bantuan. Di sisi lain, ada keluarga yang sangat membutuhkan tapi belum

terdaftar. Saya berharap ada pemantauan dan pemutakhiran data yang lebih sering untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran.”

Ketika membahas ketepatan waktu pencairan bantuan, masyarakat mengungkapkan bahwa sebelum pandemi COVID-19, pencairan bantuan dilakukan sesuai jadwal rutin setiap bulannya. Namun, selama pandemi, ada keterlambatan dalam penyaluran bantuan akibat protokol physical distancing yang diterapkan di tempat-tempat distribusi seperti E-Waroeng. Meskipun demikian, mereka mengapresiasi upaya dari pihak Dinas Sosial dalam memastikan agar saldo Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) diisi tepat waktu untuk meminimalisir dampak dari keterlambatan tersebut. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan dalam implementasi, program BPNT tetap berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat. Pendapat dari narasumber mengenai hal ini adalah sebagai berikut:

“Tentu, Program BPNT sangat membantu kami dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Kami mendapat banyak dukungan dari pendamping BPNT dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Mereka sangat informatif tentang proses registrasi, pencairan, dan penggunaan bantuan. Pendamping BPNT selalu memberikan penjelasan yang jelas tentang cara menggunakan kartu dan memberikan informasi terbaru. Mereka juga terlibat dalam rapat koordinasi bulanan di Dinas Sosial untuk memperbarui informasi terkait program.”

Dari segi pencapaian tujuan program, masyarakat melaporkan bahwa BPNT efektif dalam membantu mereka memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Melalui sistem E-Waroeng, mereka dapat memilih sendiri komoditas yang mereka butuhkan, seperti beras, tempe, daging, dan sayuran, dengan menggunakan saldo dari KKS. Selain membantu dalam pemenuhan gizi, program ini juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya transaksi non-tunai, meskipun ada tantangan dalam pemahaman teknologi di kalangan sebagian warga. Namun, mereka merasa bahwa program ini telah membantu meningkatkan ketahanan pangan di desa mereka. Mengenai keefektifan program BPNT peneliti mencoba mewawancarai narasumber yaitu penerima BPNT dan jawaban beliau sebagai berikut:

“Program BPNT sangat efektif dalam membantu kami memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Dengan menggunakan sistem E-Waroeng, kami bisa memilih sendiri komoditas yang kami butuhkan, seperti beras, tempe, daging, dan sayuran. Program ini sangat membantu dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga kami karena kami bisa membeli bahan makanan yang bergizi dan berkualitas. Meskipun ada beberapa tantangan, terutama bagi warga yang kurang familiar dengan teknologi, pendamping program dan petugas di E-Waroeng sangat membantu dan dengan sabar mengajarkan kami cara menggunakan kartu dan melakukan transaksi. Secara keseluruhan, program ini sangat membantu dalam meningkatkan ketahanan pangan di desa kami.”

Perubahan nyata yang dirasakan masyarakat sebagai dampak dari program BPNT juga menjadi sorotan penting. Masyarakat melaporkan adanya perubahan positif dalam kesejahteraan ekonomi dan pemenuhan gizi sejak mengikuti program ini. Mereka merasa dihargai dan didukung dengan adanya bantuan ini, yang tidak hanya membantu mereka secara langsung tetapi juga memberikan entusiasmo dan harapan setiap bulannya. Respons positif ini menunjukkan bahwa BPNT tidak hanya memberikan bantuan pangan, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk mengelola bantuan mereka sendiri.

Namun, ada beberapa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi program BPNT. Masyarakat mengakui sinergi yang baik antara TKSK, pendamping bantuan, dan E-Waroeng sebagai faktor pendukung utama. Namun, ada masalah seperti ketidakakuratan data penerima manfaat, kendala teknis terkait saldo KKS, dan prosedur administratif yang rumit dalam

pengelolaan kartu yang hilang yang perlu segera ditangani untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program ini.

Secara keseluruhan, pandangan masyarakat penerima manfaat memberikan gambaran yang jelas tentang berbagai aspek program BPNT. Meskipun ada tantangan yang perlu diatasi, program ini memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Desa Ngampel dalam meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan ekonomi mereka.

Tabel 1
Data Penerima Bantuan Langsung Non Tunai Tahun Anggaran 2023
Desa Ngampel Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang

NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI- LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	ALAMAT	RT	RW
9	10	11	12	13	14
DWI RAHAYU NENGSEH	2	12/02/1994	DUSUN MINGGIRJO	1	1
PONO	1	20/09/1977	DUSUN MINGGIRJO	1	1
BUDI JAINUL ACHMAD ARIFIN	1	28/07/1990	DUSUN MINGGIRJO	1	1
APRILIA WATI	2	30/04/2000	DUSUN NGAMPEL	2	2
YUYUN SRI FATUNIN	2	26/02/1983	DUSUN MINGGIRJO	1	1
BARNO	1	28/04/1948	DUSUN NGAMPEL	4	2
SARIADI	1	04/02/1989	DUSUN MINGGIRJO	1	1
SRIBUT	1	26/04/1969	DUSUN MINGGIRJO	1	1
SUHARTATIK	2	01/10/1981	DUSUN MINGGIRJO	1	1
BANI	2	05/04/1946	DUSUN MINGGIRJO	1	1
SARNI	2	21/11/1971	DUSUN MINGGIRJO	1	1
PARNO	1	22/12/1957	DUSUN MINGGIRJO	1	1
YULIATIN	2	21/01/1979	DUSUN MINGGIRJO	1	1
NGATIYAH	2	01/07/1959	DUSUN NGAMPEL	2	1
RUKAJAH	2	03/05/1934	DUSUN NGAMPEL	2	1
SUPENO	1	11/09/1959	DUSUN NGAMPEL	2	1
PONIRAN	1	01/07/1933	DUSUN	2	1

			NGAMPEL		
MOH. SUHUD	1	05/08/1990	DUSUN NGAMPEL	2	1
AHMAD RIDLWAN	1	11/05/1987	DUSUN NGAMPEL	2	1
SUTRI	2	01/07/1976	DUSUN NGAMPEL	2	1
KAREN	1	05/06/1968	DUSUN NGAMPEL	2	1
SINI	2	12/09/1971	DUSUN NGAMPEL	3	1
SATI	2	01/07/1968	DUSUN NGAMPEL	3	1
SUKINAH	2	10/03/1965	DUSUN NGAMPEL	3	1
TRIMAN	1	01/01/1964	DUSUN NGAMPEL	3	1
SLAMET RIAN TO	1	20/12/1964	DUSUN NGAMPEL	4	1
BAMBANG GIAN TO	1	02/11/1993	DUSUN NGAMPEL	4	1
TASMINI	2	01/10/1969	DUSUN NGAMPEL	4	1
TUKIMIN	1	01/07/1962	DUSUN NGAMPEL	4	1
SOFIYA FITAYANTI	2	28/01/1984	DUSUN JATI	1	2
SUGIONO	1	12/12/1964	DUSUN JATI	1	2
SUYAN NURHUDIN	1	02/10/1982	DUSUN JATI	1	2
SITI NADHIROH	2	10/08/1988	DUSUN JATI	1	2
BUDI PRATIO	1	22/07/1992	DUSUN JATI	1	2
MURAH	2	31/12/1966	DUSUN JATI	1	2
FIKI ARDIONO	1	13/10/1991	DUSUN NGAMPEL	2	2
CHUSNUL CHOTIMAH	2	01/04/1973	DUSUN NGAMPEL	3	2
NYAMIN	1	04/07/1952	DUSUN NGAMPEL	2	2
MUJI ANTORO	1	04/09/1993	DUSUN NGAMPEL	2	2
MUSLIKHAH	2	04/05/1971	DUSUN NGAMPEL	3	2
SARIMAH	2	31/12/1959	DUSUN NGAMPEL	3	2

HARUN	1	01/07/1966	DUSUN NGAMPEL	3	2
AYATIN	2	05/03/1967	DUSUN NGAMPEL	3	2
MUTMAINAH	2	11/04/1996	DUSUN NGAMPEL	4	2
SRIANI	2	01/07/1950	DUSUN NGAMPEL	4	2
DARIYANTO	1	12/05/1969	DUSUN NGAMPEL	4	2
PARTINI	2	12/03/1955	DUSUN NGAMPEL	4	2
SUHADAK	1	13/09/1980	DUSUN NGAMPEL	4	2
SULIYAH	2	16/09/1984	DUSUN NGAMPEL	4	2
SITI MUFADILAH	2	17/02/1968	DUSUN NGAMPEL	4	2
SUTRIS	1	04/11/1957	DUSUN NGAMPEL	4	2
SAMIRAN	1	01/07/1955	DUSUN NGAMPEL	4	2
KACUNG KHOIRI	1	02/04/1971	DUSUN NGAMPEL	4	2

Sumber : DTKS yang dikeluarkan oleh Kementerian sosial Republik Indonesia

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari berbagai perspektif di atas, dapat disimpulkan bahwa BPNT di Desa Ngampel menunjukkan beberapa aspek efektivitas yang signifikan:

1. Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Desa Ngampel berhasil mengurangi tingkat kemiskinan dengan menyediakan akses pangan yang lebih terjangkau dan bergizi bagi masyarakat yang membutuhkan, seperti yang dilihat dari perspektif Kepala Desa. Kepala Desa melihat BPNT sebagai instrumen efektif dalam menanggulangi kemiskinan dengan memberikan bantuan langsung kepada mereka yang membutuhkan, sehingga memberikan dampak positif langsung terhadap kesejahteraan sosial di tingkat desa. Bantuan ini tidak hanya sekadar pemberian, tetapi juga menjadi alat untuk memastikan bahwa setiap keluarga memiliki akses yang cukup terhadap pangan bergizi, yang secara signifikan mengurangi tekanan ekonomi mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Selain itu, BPNT juga membantu mengatasi ketimpangan sosial ekonomi di desa dengan memberikan kesempatan yang setara bagi masyarakat yang miskin untuk memperoleh pangan yang layak.
2. Melalui pendampingan pemberdayaan, Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Desa Ngampel tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan pangan semata, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya dan peluang yang diberikan untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang. Pendampingan pemberdayaan ini penting karena memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami dan mengoptimalkan manfaat dari BPNT secara maksimal. Salah satu aspek utama dari pendampingan ini adalah edukasi tentang pentingnya gizi dan cara yang tepat untuk memanfaatkan bantuan pangan yang diterima. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai gizi dari makanan yang mereka beli dengan kartu BPNT, pendampingan pemberdayaan membantu memastikan bahwa masyarakat

dapat memilih dan mengonsumsi makanan yang lebih sehat dan bergizi bagi keluarga mereka. Selain itu, pendampingan pemberdayaan juga melibatkan pelatihan dan bimbingan tentang manajemen keuangan sederhana. Ini membantu masyarakat dalam mengelola penggunaan kartu BPNT mereka secara efisien, menghindari pemborosan, dan memastikan bahwa bantuan yang diterima dapat berkelanjutan dalam jangka panjang.

3. Respons masyarakat yang umumnya positif terhadap Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Desa Ngampel merupakan indikasi kuat bahwa program ini memberikan manfaat yang nyata dalam meningkatkan kualitas hidup mereka secara signifikan. Pertama-tama, respons positif ini tercermin dari pengalaman langsung masyarakat yang merasa terbantu dengan adanya BPNT. Dengan kartu BPNT, mereka mendapatkan akses yang lebih mudah dan terjamin terhadap pangan yang berkualitas dan bergizi. Ini tidak hanya membantu mengatasi masalah kelaparan secara langsung, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan status gizi dan kesehatan keluarga, terutama bagi mereka yang sebelumnya memiliki keterbatasan dalam mengakses makanan yang cukup dan bergizi. Selain itu, kemudahan dalam penggunaan kartu BPNT untuk bertransaksi juga merupakan faktor penting dalam respons positif masyarakat. Dibandingkan dengan sistem bantuan konvensional yang mungkin kurang transparan atau rentan terhadap penyalahgunaan, kartu BPNT memberikan kejelasan dan keamanan dalam penggunaan bantuan, sehingga masyarakat merasa lebih percaya dan aman dalam menggunakan fasilitas ini. Selanjutnya, respons positif ini mencerminkan apresiasi terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka melalui BPNT..

Saran

Untuk memaksimalkan efektivitas BPNT di Desa Ngampel, beberapa rekomendasi berikut dapat dipertimbangkan:

1. Peningkatan Manajemen Administratif: Fokus pada penyederhanaan prosedur administratif dan peningkatan manajemen data untuk mengurangi hambatan administratif yang dihadapi masyarakat.
2. Penguatan Pendidikan dan Pelatihan: Intensifikasi pendekatan edukasi dan pelatihan bagi masyarakat tentang pengelolaan keuangan dan pentingnya gizi untuk meningkatkan pemahaman dan kemandirian mereka.
3. Partisipasi Aktif Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dengan program ini untuk memastikan bahwa program BPNT dapat lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan aspirasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Gibson, James L. 2005. Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses. Jakarta: Erlangga.
- Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua. Erlangga. Jakarta.
- Irawan & Suparmoko. 2007. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: BPFE
- Khairuddin. 2007. Sosiologi Keluarga. Yogyakarta: Liberty.
- Lembaga Ketahanan Nasional. 2008. Pembangunan Nasional. Jakarta: Balai Pustaka.
- Moleong, lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Santoso. 2009. Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional. Bandung: Alumni.
- Siagian, Matias. 2011. Metode Penelitian Sosial, Pedoman Praktis Penelitian Bidang Ilmu Sosial dan Kesehatan. Grasindo Monoratama. Medan.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Penerbit Citra Utama.
- Sumodingrat, Gunawan. 2009. Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sutrisno, Edy. 2007. Budaya Organisasi. Kencana. Jakarta.
- Soetomo. 2010. Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Tim Crescent. 2005. Menuju Masyarakat Mandiri (Pengembangan Model Sistem Keterjaminan Sosial). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Usman, H. 2009. Metodologi Penelitian Sosial, Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.